



MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

INDONESIAN SOCIETY FOR DISASTER MANAGEMENT

Jl. Perserikatan A No. 01 Rt. 002 Rw. 008 Rawamangun Pulo Gadung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

email: mpbi.sekretariat@gmail.com ; Web: www.mpbi.info

SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA

BANJIR JABODETABEK:

BUKTI BURUKNYA TATA KELOLA, JANGAN SALAHKAN ALAM

Versi singkat

Jakarta, 10 Maret 2025, – Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendesak semua kepala daerah untuk tidak lagi mengkambinghitamkan alam atas terjadinya banjir dan tanah longsor yang terus berulang. MPBI menegaskan bahwa bencana adalah konsekuensi dari tata kelola lingkungan yang buruk dan kurangnya investasi dalam pencegahan.

"Bencana bukan hanya fenomena alam, melainkan hasil dari keputusan manusia," tegas Avianto Amri, Ketua Umum MPBI. "Kepala daerah harus berhenti mencari alasan dan mulai memprioritaskan keselamatan warga."

Banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret 2025, yang berdampak pada 120 ribu warga, adalah bukti nyata dari masalah ini. Data BNPB menunjukkan bahwa ratusan kabupaten/kota di Indonesia rawan banjir dan longsor, dan perubahan iklim hanya memperburuk risiko ini.

MPBI memperingatkan, tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, ribuan warga akan terus menjadi korban, dan pemerintah daerah akan terus mengeluarkan biaya respon bencana besar.

MPBI menyerukan kepada kepala daerah untuk:

- Memprioritaskan penanggulangan bencana di RPJMD 2025-2029.
- Memastikan tata ruang yang berkelanjutan dan melindungi daerah resapan air.
- Meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini.
- Menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.
- Melibatkan LSM dan akademisi dalam penyusunan RPJMD.

"RPJMD adalah kesempatan emas untuk mengubah arah pembangunan daerah," kata Amri. "Kepala daerah harus memastikan kebijakan pembangunan berorientasi pada keselamatan masyarakat, atau mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih buruk."

MPBI juga mengajak LSM, akademisi, dan media untuk aktif mengawasi proses penyusunan RPJMD, memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah inklusif, transparan, dan berbasis pada pengurangan risiko bencana. "Jangan tunggu bencana berikutnya baru bertindak," pungkas Amri. "Saatnya memastikan pembangunan daerah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan."

=====



MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

INDONESIAN SOCIETY FOR DISASTER MANAGEMENT

Jl. Perserikatan A No. 01 Rt. 002 Rw. 008 Rawamangun Pulo Gadung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

email: mpbi.sekretariat@gmail.com ; Web: www.mpbi.info

Versi lengkap

Jakarta, 10 Maret 2025, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menyalahkan hujan deras atau faktor alam sebagai penyebab bencana. Banjir dan tanah longsor yang terus berulang di Indonesia adalah dampak dari buruknya tata kelola lingkungan, lemahnya perencanaan tata ruang, serta minimnya investasi dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

Bencana ini bukan sekadar fenomena alam—bencana terjadi akibat konsekuensi dari interaksi antara fenomena alam, kerentanan, dan kapasitas, di mana keputusan manusia memainkan peran penting. Ketika daerah resapan air dihilangkan untuk proyek komersial, ketika daerah aliran sungai dan drainase tidak diperbaiki, ketika peringatan dini tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka dampaknya adalah kerugian besar yang dialami masyarakat. Banjir yang melanda Jabodetabek pada awal Maret 2025 berdampak pada hampir 120 ribu warga terdampak akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh buruknya sistem drainase, penyempitan sungai, dan berkurangnya daerah resapan air.

Menurut data BNPB, setidaknya terdapat 315 kabupaten/kota di Indonesia rawan banjir dan 274 kabupaten/kota rawan tanah longsor. Dengan adanya fenomena perubahan iklim, minimnya investasi pada pencegahan dan mitigasi, serta buruknya tata guna lahan, para kepala daerah harus bersiap menghadapi skenario terburuk. Ribuan warga akan terdampak, kehilangan tempat tinggal, serta terpaksa mengungsi, sementara pemerintah daerah harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk respons dan pemulihan bencana. Selain itu, risiko korban jiwa akan meningkat, disertai dengan ancaman penyakit akibat banjir dan kerusakan ekonomi daerah akibat infrastruktur yang rusak.

Semua ini sebenarnya adalah pilihan. Bencana bisa dicegah, asalkan kepala daerah mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan keselamatan warganya. Pemerintah daerah harus berhenti mencari kambing hitam pada alam, dan mulai memperbaiki kebijakan serta investasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Banjir bukan karena hujan deras, tetapi akibat buruknya tata kelola lahan dan sistem drainase. Longsor bukan karena curah hujan tinggi, tetapi juga karena eksploitasi lahan dan deforestasi di daerah rawan.

"Para Kepala daerah yang baru dilantik tidak boleh hanya fokus pada respons bencana, mereka harus berpikir jangka panjang. Banjir dan longsor bukanlah disebabkan karena alam, tetapi kegagalan tata kelola dan kurangnya investasi pada pencegahan. Saat ini, mereka memiliki kesempatan emas dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada keselamatan masyarakat. Jika kebijakan ini tidak diubah, maka pemerintah daerah harus siap menghadapi dampak yang lebih buruk di masa depan" ujar Avianto Amri, Ketua Umum MPBI.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 sudah dalam tahap finalisasi dengan target untuk disahkan di bulan Agustus 2025. RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cetak biru pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Jika pemerintah daerah gagal mengintegrasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan mereka, maka mereka harus siap menghadapi dampak yang lebih buruk di masa depan.



MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

INDONESIAN SOCIETY FOR DISASTER MANAGEMENT

Jl. Perserikatan A No. 01 Rt. 002 Rw. 008 Rawamangun Pulo Gadung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

email: mpbi.sekretariat@gmail.com ; Web: www.mpbi.info

Jangan tunggu bencana berikutnya baru bertindak. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Saatnya memastikan pembangunan daerah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Seruan MPBI kepada Kepala Daerah

MPBI memanggil para kepala daerah untuk:

- a. Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025-2029 dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
- b. Mewajibkan pengelolaan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dengan memastikan kawasan resapan air tetap terjaga dan pembangunan tidak dilakukan di daerah rawan bencana.
- c. Meningkatkan efektivitas peringatan dini, dengan memastikan informasi cuaca ekstrem dapat diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam format yang mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat segera ditindaklanjuti.
- d. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko menciptakan bencana baru, termasuk meninjau kembali proyek pembangunan yang berpotensi memperburuk dampak bencana.
- e. Mengajak akademisi dan kelompok LSM untuk terlibat aktif dalam penyusunan RPJMD, agar prosesnya lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berbasis bukti.

Peran Lembaga Non-Pemerintah: LSM, Akademisi, dan Media

Proses penyusunan RPJMD bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. MPBI menyerukan kepada seluruh LSM, akademisi, dan media untuk turut serta dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah agar lebih inklusif, transparan, dan berbasis pada pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- **Kelompok LSM dan akademisi** harus aktif memberikan masukan berbasis data dan bukti dalam setiap tahapan konsultasi publik RPJMD, memastikan kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana.
- **Media** harus berperan lebih aktif dalam mengawasi penyusunan RPJMD agar berjalan secara demokratis, partisipatif, dan tepat sasaran. Media juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik tentang pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan dan ketahanan lingkungan.

=====

Tentang Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) adalah organisasi independen yang beranggotakan para profesional, akademisi, praktisi, serta pegiat kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana (PRB) dan tanggap darurat di Indonesia. Sejak didirikan lebih dari 20 tahun yang lalu, MPBI telah aktif dalam mendorong kebijakan, advokasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun ketangguhan terhadap bencana, termasuk menginisiasi penyusunan Undang-Undang no. 24



MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

INDONESIAN SOCIETY FOR DISASTER MANAGEMENT

Jl. Perserikatan A No. 01 Rt. 002 Rw. 008 Rawamangun Pulo Gadung,

Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

email: mpbi.sekretariat@gmail.com ; Web: www.mpbi.info

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. MPBI berkomitmen untuk memastikan bahwa pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). MPBI juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan media dalam memperkuat tata kelola kebencanaan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Avianto Amri, Ketua Umum, MPBI

Mobile: +628552106610

 www.mpbi.info

 mpbi.sekretariat@gmail.com